



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I NYOMAN JENDRIKA
2. Jabatan : KEPALA BIRO UMUM
3. NHK : 402360

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.775.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/100 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 7 m2/28 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 6200 m2 di BULELENG, WARISAN Rp. 350.000.000
4. Tanah Seluas 5200 m2 di BULELENG, WARISAN Rp. 200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/150 m2 di KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 254.500.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 36.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 58.233.886**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 3.123.733.886**III. HUTANG** Rp. 901.530.089**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.222.203.797



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.